

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Apa yang penulis saksikan pada dewasa ini, mengingatkan saya pada waktu kecil disela-sela waktu yang senggang, kakek saya sering bercerita tentang riwayatnya waktu masa penjajahan kolonial Belanda, kemiskinan dan kelaparan di akibatkan kelangkaan bahan makan, antrian panjang manusia untuk mendapatkan jatah beras pada saat penjajahan dulu, lahan perkebunan maupun lahan pertanian masyarakat di ambil alih oleh pemerintahan kolonial belanda dan upah buruh yang tidak sebanding bahkan tidak bayar, sungguh tidak terbayangkan penderitaan yang dialami nenek moyang kita waktu jaman kolonial dulu, serentak membuat darah nasionalisme kecil saya membakar. Namun dalam hati kecil saya berpesan semoga saya tidak merasakan penderitaan mereka.

Namun sesungguhnya dalam banyak hal apa yang saya liat dewasa ini hanyalah *tautologi* atau pengulangan yang memiliki makna yang sama dari apa yang dialami pada zaman penjajahan pemerintahan Belanda di masa lalu. Meminjam kata Amien Rais, Perbedaan antara penjajahan kolonial tempo *doloe* dan masa sekarang hanyalah dalam bentuk atau format yang belaka. Dahulu pendudukan fisik dan militer kolonial belanda menyebabkan bangsa indonesia kehilangan kemerdekaan, kemandirian, dan kedaulatan politik, ekonomi, sosial, hukum dan pertahanan, sedangkan pada zaman sekarang

tetapi bangsa ini telah kehilangan kemandirian, dan sampai batas yang cukup jauh. Dalam banyak hal bangsa Indonesia telah menggantungkan diri pada kekuatan asing.

Dalam hal ini penulis bisa membenarkan apa yang menjadi analisa kritis Tan Malaka dalam "MADILOG" yang ditulisnya pada tahun 1942-1943, merupakan karya besarnya, dalam analisisnya ia mengatakan dari dulu sampai sekarang "bangsa Indonesia selalu menjadi wayang, yang dimainkan luar negeri sebagai dalangnya¹. Lebih jauh ia menganalisa penyebabnya bangsa sekian lama terjajah bahkan sampai akhir ini, ia menekankan pada mentalitas pasif dan tidak ada sifat untuk mencoba atau menerobos hal-hal baru, inilah yang menyebabkan selalu menerima saja nasib yang akan menimpanya.

Kedaulatan ekonomi yang telah bangsa ini gadaikan pada kekuatan asing dalam hal ini hakekatnya telah melemahkan kedaulatan politik, diplomatik, pertahanan dan militer kita. Bisa kita saksikan dalam hampir setiap kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri Indonesia selalu kelihatan pengaruh besar kepentingan asing yang melemahkan kepentingan-kepentingan nasional bangsa ini sendiri. Dalam era globalisasi Indonesia telah terseret sebagai agen setia bagi kepentingan asing.

Neoliberal merupakan suatu perwujudan atau konsep yang baru dari paham Liberalisme saat ini dapat dikatakan telah menguasai sistem perekonomian dunia. Neoliberalisme bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan kekuasaan pasar atau perdagangan bebas (pasar bebas), dengan

Karena kewenangan negara yang besar, maka sarana negara itulah yang digunakan para perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional untuk mengembangkan usahanya di wilayah tersebut, didukung dengan dana yang besar tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan usahanya di berbagai negara. Untuk mencapai tujuannya maka tidak aneh perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional memiliki pengaruh yang kuat dalam politik global. Untuk mempertahankan dan memperluas pengaruh politik globalnya korporat-korporat bernaung dibawah bendera WTO (World Trade Organisation), didalam organisasi ini mereka membuat kebijakan ekonomi pasar global yang jelas tentu menguntungkan para anggota-anggotanya. Karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat kuat dan besar tidak menutup kemungkinan untuk bisa mempengaruhi kebijakan ekonomi dan politik suatu negara³.

Maka tidak asing lagi bila kondisi penghisapan yang dilakukan para kapitalis dapat berlangsung sedemikian lamanya, alat yang dibuat untuk mempertahankan penindasan terhadap masyarakat yang digunakan para kapitalis adalah negara. Masyarakat sering didengarkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kapitalis, bahwa mereka mewakili semua golongan, baik yang kaya maupun yang miskin, Tetapi sebenarnya sejak masyarakat kapitalis yang didasarkan atas kepemilikan pribadi atas alat produksi, serangan apaun terhadap kepemilikan kapitalis,

³ Karl Marx dan Friedrich Engels, dalam manifestonya menyatakan "Borjuis tidak hidup tanpa merevolusionerkan alat-alat produksinya dan karenanya merevolusionerkan hubungan-hubungan produksi, dan dengan itu semua merevolusionerkan dalam segenap hubungan dalam masyarakat" Dari teks tersebut kapitalisme tidak bisa hidup atau berkembang disuatu negara, mereka berusaha dengan

akan dihadapi dengan kekerasan, pemerintah kapitalis dengan menggunakan kekuatan militer, undang-undang, pengadilan, dalam artian negara telah berfungsi sebagai *garde dog* atau anjing penjaga dari keberlangsungan sistem kepemilikan pribadi yang menguntungkan kelas kapitalis, kelas yang menghegemoni ekonomi, yang memiliki alat-alat produksi, juga berkuasa atas politik.⁴

Seperti yang disebutkan diatas, maka sejak naiknya pemerintahan orde baru dibawah pimpinan Soeharto, indonesia telah masuk dalam cengkraman kaum pemilik modal. Semua pemerintah yang berkuasa dari masa Soeharto hingga sampai masa pemerintahan SBY-JK adalah pemerintah nasional yang menjadi agen mitra setia para kaum-kaum pemilik modal. Pemerintahan telah berganti-ganti sebanyak empat kali namun pemerintahan pasca reformasi tunduk pada tuan yang sama, yaitu para pemilik modal. Semua agenda para pemilik modal diimplementasikan dengan cukup baik dan sigap oleh pemerintah selama ini.

Dalam bab pendahuluan ini penulis mendeskripsikan secara singkat indikasi-indikasi pengaruh paham neoliberal terhadap demokrasi ekonomi dan politik dari pemerintahan Orde Baru sampai pada pasca Reformasi.

Pada pemerintahan Orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto telah memberikan jalan yang mulus kepada instrumen neoliberal, Obsesif pemerintahan Orde Baru untuk mengejar tingkat pertumbuhan yang cepat, Pengadopsian teori Pertumbuhan Rostow dan dorongan kuat dari teori *Big*

⁴ Karl Marx's dalam konsepnya tentang negara, Marx mengatakan, Negara adalah alat dari kelas yang berkuasa, yakni kelas bangsawan di negara feodal, dan pemilik modal di negara kapitalis. Dalam

Push oleh Paul N Rosenstein Rodan untuk melepaskan diri dari keterbelakangan ekonomim Orde Lama adalah pinjaman dan menarik penanaman modal asing, Singkatnya kedua teori itu pada gilirannya, pemerintahan Orde Baru menerapkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967. Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 sebagai blue print, sebagai implemtasinya dapat dilihat dari peranan yang amat menentukan dari IGGI (Inter Governmental Group on Indonesia) kelompok yang negara-negara kapitalis yang tercantum didalamnya antara lain: Jepang, Prancis, USA, dan diketuai oleh Belanda. Nagara-nagara kapitalis ini memberikan kucuran dana untuk menjamin kredit internasional dapat mengalir secara reguler.⁵

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal oleh pemerintahan orde baru, perekonomian indonesia tumbuh dengan cepat. Pertumbuhan ekonomi rata-rata per-tahun mencapai tujuh persen. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut dibarengi dengan keberhasilan mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk ke tingkat yang relatif rendah, telah berhasil meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat scara berarti. Antara lain ditunjukkan oleh berbagai indikator seperti makin membaiknya pendapatan per kapita, menurunnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya rata-rata harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi, serta membaiknya kesempatan memperoleh pendidikan.

Tetapi di samping kemajuan yang begitupesat, kesenjangan sosial ekonomi juga muncul sebagai fenomena yang memprihatinkan. Kesenjangan tersebut ditandai oleh data yang menunjukkan, bahwa 58 persen GNP dikuasai 200 konglomerat, sedangkan 24 persen GNP merupakan kontribusi sekitar 180 BUMN. Sekitar 8 persen GNP, kontribusi dari sekitar 33,5 juta usaha kecil dan 10 persen GNP sisanya adalah koperasi, sektor informal, dan sebagainya. (Didin halaman 177).⁶

Singkatnya, Tingkat pembangunan pertumbuhan ekonomi yang cepat (*Ravid growth developmant model*) yang dipraktekan melalui kebijakan-kebijakan pada pemerintahan orde baru meninggalkan benih-benih yang akan tumbuh menghancurkan sistem dan model tersebut. Itulah model dan sistem pembangunan pertumbuhan cepat (*Ravid growth developmant model*) yakni suatu model pertumbuhan yang tanpa didukung oleh penguatan tabungan dan investasi domestik. Seperti kasus krisis Taiwan dan Korea yang sangat tergantung pada suntikan modal asing.

Apa yang menjadi kekhawatiran ekonom yang anti neoliberal pada saat itu akhirnya terjawab, pada akhir tahun 1997 sungguhlah mencengangkan, banyak negeri di Asia tiba-tiba saja diguncang badai krisis. Pertumbuhan 7-8 % per tahun, *Asian Miracle* dan sebagainya yang selama puluhan tahun dipuji-puji oleh banyak pejabat, IMF, dan ekonom-ekonom liberal lenyap dalam sekejap. Di Indonesia, nilai rupiah merosot drastis sebesar 85 % (antara Juli dan Februari 1998, bahkan pernah nilai rupiah menyentuh angka Rp. 16.000 per 1 US dollar). Industri terutama yang berbasis baku impor

dan modalnya diperoleh dari hutang luar negeri, gulung tikar. Puluhan juta buruh kehilangan pekerjaan akibat PHK, harga-harga barang melambung lebih dari 100 %, inflasi terjadi hingga 77,6 % dari satu tahun sebelumnya. Krisis, yang oleh banyak ekonom borjuis disebut krisis moneter, telah menyebabkan pendapatan per kapita merosot dari 1.200 US dollar menjadi 500 US dollar. Dampak sosial paling mencolok adalah jumlah penduduk miskin yang berlipat menjadi hampir 80 juta orang. Ini adalah data terakhir BPS.⁷

Akibat krisis moneter tersebut, tingkat kesejahteraan rakyatpun menurun dratis. Daya beli masyarakat menurun dan dibarengi dengan meningkatnya harga kebutuhan akan barang-barang jauh tak terjangkau oleh masyarakat. Angka kematian bayi meningkat karena gizi buruk disebabkan mahalnya asupan gizi, obat-obatan menjadi suatu kekhawatiran baru.

Setelah jatuhnya rezim orde baru pada tahun 1998, yang meninggalkan segudang permasalahan ekonomi seperti yang telah penulis singgung diatas. Besar harapan rakyat indonesia kepada kepemimpinan berikutnya mampu memulihkan kondisi ekonomi dan politik ke arah yang lebih baik dan demokratis yang sesuai dengan nilai-nilai kostitusional. Namun Reformasi telah berjalan selama 10 tahun dan indonesia telah mengalami empat kali pergantian kepemimpinan, akan tetapi cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum juga tercapai.

Dari pemerintahan Soeharto, Habibie, Abdul Rahman Wahid, Megawati, sampai Kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono yang telah

sesungguhnya kedua hal tersebut hanyalah faktor yang memperparah saja, dan bukan faktor fundamental.

Kebijakan neoliberal, dimana salah satunya adalah skema SAP (*Structural Adjustment Program*) atau Program Penyesuaian Struktural yang didiktekan IMF melalui LoI (*Letter of Intents*) kepada pemerintah Indonesia. Skema SAP tersebut secara garis besar adalah: Pertama, liberalisasi perdagangan. Kedua, Privatisasi atau swastanisasi BUMN. Ketiga, Penghapusan Subsidi untuk program-program kesejahteraan. Dan Keempat, restrukturisasi Keuangan (Moneter).

Tidaklah mengherankan jika pada masa rezim Habibie, demi mendapatkan kucuran dana dari IMF, dengan cepat pemerintah melengkapi syarat-syarat yang diajukan IMF yaitu, menghapus tarif bea masuk beras dan gula impor hingga 0 % dan komitmen dalam jangka panjang penghapusan secara keseluruhan bea masuk produk agroindustri. Tak peduli dengan dampak sosial yang ditimbulkannya, yakni sengsaranya petani padi dan tebu karena harga beras dan gula jatuh. Jutaan petani lantas menjerit, bahkan petani tebu harus merugi 2,1 juta per hektar (Kompas, 27 Desember 1999).⁸ Demikian pula petani yang memproduksi beras. Akibatnya, banyak dari mereka tidak mampu mengembalikan KUT. Jika keadaan ini terus berlangsung, dimana serbuan beras dan gula impor merajai pasar domestik sampai pada tingkat *over* produksi, petani akan segan bertanam padi dan tebu, tak ayal, dalam jangka panjang sangat mungkin terjadi krisis pangan domestik di tengah melimpahnya produksi pangan dunia.

Ketika Pemerintahan Abdurahman Wahid, tidak jauh bedanya dengan strategi pemulihan ekonomi pada kepemimpinan Habibie. Pada pemerintahan Abdurahman Wahid, hanya merevisi kebijakan bea masuk beras impor yang ditetapkan sebesar 30%, dan bea masuk gula impor sebesar 25% per 1 januari.⁹ Penghapusan tarif impor beras dan gula, hanyalah sebagian kecil dari paket kebijakan liberalisasi perdagangan yang direkomendasikan oleh IMF. Dibidang investasi dan swastanisasi Perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) juga direkomendasikan oleh IMF sesuai dengan SAP, demi untuk mencari utang dan menutup defisit.

Di bidang investasi IMF merekomendasikan pada pemerintahan Abdurahman Wahid agar menghapus batasan kepemilikan saham 49 % bagi investor asing -kecuali perbankan--, menghapuskan larangan investasi pada sektor perkebunan, dan mencabut larangan investasi asing dalam perdagangan eceran (supermarket, mall, waralaba, dan sebagainya).¹⁰ Modal internasional pun akan leluasa mengeksploitasi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan menggusur pasar-pasar rakyat. Bisa dibayangkan, dampak sosial muncul kemudian.

Untuk menutupi defisit IMF menganjurkan pemerintahan Abdurahman Wahid untuk memprivatisasikan BUMN, menurut IMF tidak ada jalan lain untuk memperoleh devisa kecuali dengan menjual BUMN-BUMN yang tidak sehat dan BUMN-BUMN yang dipenuhi dengan praktek korupsi. Atas saran IMF, pemerintahan Abdurahwan Wahid lalu melepas sejumlah BUMN seperti

PT. Semen Gresik, PT Astra, dan Bank BCA serta masih banyak BUMN yang masih dalam tahap pelepasan. Ironisnya disini meminjam Kata Revrison Baswir "Rampokisasi", IMF mengusulkan BUMN-BUMN yang diprivatisasi adalah BUMN yang tidak sehat, tetapi faktanya BUMN yang diprivatisasi seperti PT. Semen Gresik Group (SGG) adalah BUMN yang sehat.

Pada Penghapusan Subsidi, pemerintahan Abdurahwan Wahid mengurang subsidi BBM dan tarif dasar listrik (TDL). Paham penghapusan subsidi ini adalah resep dari IMF yang berakar pada ideologi neoliberal. Pandangan ini beranggapan bahwa pemberian subsidi pada masyarakat akan menambah beban negara, dan juga akan mengganggu mekanisme pasar. Langkah berikutnya yang dilakukan Pemerintahan Abdurahman Wahid untuk mengundang investor menanamkan modalnya di Indonesia dalam bentuk modal riil, maka saran IMF yaitu memberlakukan kebijakan upah buruh yang murah. Pada tahun 2000 pemerintahan Abdurahman Wahid mematok kenaikan UMR sebesar 20%. Namun disini ada bentuk restorasi neoliberal dimana dalam ekonomi neoliberal merekomendasikan tentang pasar tenaga kerja harus fleksibel, dalam artian pemerintah tidak boleh mengintervensi upah buruh, biarkan pasar yang mengatur. Namun dalam geografis yang berbeda instrumen-instrumen neoliberal memberikan tekanan yang kuat pada negara yang memiliki elit yang lemah. Dalam konteks di Indonesia upah buruh di tekan melalui kebijakan Pemerintah.

Pengangkatan Megawati Suokarno Putri sebagai Presiden Republik

pemulihan ekonomi Indonesia. Hal itu selain dilatar belakangi dengan kejenuhan masyarakat pada pemerintahan Abdurahman Wahid. Walaupun demikian, proses pemulihan ekonomi Indonesia tentu tidak hanya ditentukan dengan pergantian kepemimpinan, jauh lebih penting dari sekedar harapan adalah arah yang akan ditentup pemerintah Presiden Megawati dalam proses memulihkan ekonomi Indonesia

Berdasarkan perkembangan yang terjadi indikasi awal adalah kecendrungan pemerintahan Megawati untuk bersahabat dengan lembaga donor internasional atau IMF dan pasar ketimbang besahabat dengan rakyat indonesia. Hal Itu setidaknya terungkap dalam tiga hal berikut : Pertama adanya keinginan yang kuat pemerintahan Megawati untuk menjalin hubungan kembali dengan IMF, hal ini di implementasikan dengan peresmian proyek pembangunan yang dibiayai dengan utang luar negeri. Kedua, dalam penyusunan Paket Kebijakan Pemulihan Ekonomi meminta IMF ikut berperan aktif dan mengawasi paket kebijakan ekonomi dan meminta IMF untuk menjadikan Paket Kebijakan ekonomi dan pelaksanaannya menjadi bagian Letter of Inten (LoI).

Dalam pemerintahan Megawati, anjuran-ajuran IMF dilaksanakan juga dengan sigap, hal ini tercermin dari anjuran IMF dalam SAP dan menjadi blue printnya latter of Inten, yaitu swastanisasi Perusahaan-perusahaan milik negara, hal ini dilakukan untuk menutupi kekurangan defisit anggaran APBN tidak ada jalan lain kecuali menjual BUMN. Demi menutup defisit APBN Pemerintahan Megawati Melepas PT. Telkom dan PT Indosat.

Muncul pertanyaan mengapa IMF gagal dalam memberikan bantuan pada negara dunia ketiga, ini terbukti dalam konteks di Indonesia. Proses pemulihan ekonomi dengan saran-saran yang diberikan IMF malah membikin masalah baru dan memelihara kemiskinan dan pengaguran. Telah banyak BUMN yang beralih penguasaan ke tangan pemodal asing dan makin bertambahnya utang luar negeri secara keseluruhan menyentuh angka 155 milyar dolar AS.¹¹

Jika kita mengatakan IMF gagal membantu pemulihan ekonomi Indonesia, ini bukan suatu yang mengejutkan. Karena sejauh ini peran IMF dengan filosofi yang dipegannya tidak selalu cocok dengan negara berkembang. Kebijakan-kebijakan IMF yang meliberalkan perekonomian dengan membuka pasar barang, modal, tenaga kerja yang seluas-luasnya, sistem kurs bebas, mengetatkan APBN, menjual BUMN, dan membatasi intervensi pemerintah, tidak jarang justru bersifat kontra produktif bagi perbaikan ekonomi negara berkembang. Tidak kurang dari Stiglitz, ekonom dunia terkemuka peraih nobel tahun 2001, menolak IMF yang dikatakannya negara-negara yang kompleks permasalahan ekonominya. Hasilnya menurut Stiglitz dalam "Globalization and Its Discontents" justru mendorong penyebaran resesi ekonomi dari suatu negara ke negara yang lain, meyulitkan masyarakat miskin karena IMF sangat berorientasi pada kepentingan elit para kreditor, menimbulkan penganguran.

Kritik Stiglitz pada IMF tersebut tampak jelas dalam ekonomi Indonesia saat ini. Ajuran IMF agar anggaran diketatkan dan defisit ditekan

yang akhirnya menui benih kelambanan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pengangguran, penjualan BUMN secara obral dan jatuh kepada tangan modal asing, dihapuskannya segala bentuk subsidi dalam tempo yang singkat dengan kosekuensi merosotnya daya beli masyarakat, dan meningkatnya penduduk miskin.¹² Kita terpaksa mengikuti pandangan IMF kare itulah syarat dari pinjaman yang dipinjamkan. Namun demikian harus diakui IMF cukup membantu untuk persoalan jangka pendek, seperti gejala nilai tukar rupiah.

Dari hal-hal tersebut diatas, maka jelas terlihat bahwa pemerintah sangat berpihak pada para pemilik modal. Negara sangat berperan dalam menjaga kondisi sistem ekonomi Neoliberalisme yang sangat menyemaikan para pemilik modal. Selama negara masih didominasi oleh para elit politik dan pengusaha, maka kondisi yang menindas rakyat Indonesia akan tetap terjaga. Para elit politik dan pengusaha pun berusaha sekuat tenaga agar kondisi ini tidak berubah.

Besar harapan masyarakat pada kepemimpinan Susilo Bmabang Yudonono, bisa mengatasi permasalahan kembar kemiskinan dan pengangguran bisa teratasi secara signifikan, namaun harapan besar itu kandas, sekitar 40 persen rakyat indonesia dilapisan bawah justru semakin merosot¹³. Sungguh tidak terlalu sulit untuk menjawab pertanyaan, mengapa bangsa Indonesia yang kaya raya ini melarat.

¹² http://www.ekonomirakyat.org/edisi_16artikel_4htm

¹³ http://www.ekonomirakyat.org/edisi_16artikel_4htm 2005, bangsa 40 persen golongan masyarakat miskin

Ada bentuk perbedaan antara pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono, dengan pemerintahan Habibie, Abdurahman wahid dan Megawati dalam proses pemulihan ekonomi indonesia, tetapi esensinya sama yaitu penerapan ekonomi neoliberal. Pada Pemerintah SBY indonesia telah terlepas dari campur tangan IMF, malupun IMF sangat memantau perkembang pertumbuhan ekonomi Indonesia¹⁴. Pengaruh paham ekonomi neoliberal di implementasikan dalam regulasi Undang-Undang Penanaman Modal Asing 2007.

Campur tangan asing sangat kental dalam mewarnai agenda-agenda kebijakan ekonomi dan politik di kepemimpinan SBY, berangkat dari UU No. 25 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden No.76 dan 77, SBY telah menjual bangsa ini ketangan Kapitalis-kapitalis asing. Secara akademik saya melihat ada kesesaatan pikir pemerintah dalam mengkostruksi bangunan perekonomian di indonesia. Para aktor pengerak pembangunan ekonomi meyakini dengan investasi asing maka pengangguran dan kemiskinan yang selama ini menjadi masalah kembar siam bisa teratasi dengan masuknya perusahaan-perusahaan asing untuk mengelola segala sumber daya alam di Indonesia. Kepercayaan yang dalam dan fanatisme terhadap teori modernisasi dan pertumbuhan ekonomi lantas menjadikan teori ini menjadi ideologi bagi pembangunan di indonesia. Doktrin pertumbuhan ekonomi ini tidak mengangkat kesejahteraan rakyat yang menjadi proyek besar bangsa ini, malah menjadikan proyek besar itu menjadi statis dalam artian tidak

¹⁴

mengalami perubahan yang signifikan. Lantas yang terjadi bangsa ini mejadi kado yang istimewa buat kaum kapitalis dalam meraih tujuannya, yaitu mengakumulasi modal sebanyak-banyaknya.

Dengan kondisi saat ini indonesia memang belum sampai pada tahapan negara gagal atau *failed state*, akan tetapi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada dasarnya telah menjadi *Broken Government*, pemerintah yang telah gagal dalam menjalani proyek besar dalam pembukaan Undang-Undang dasar negara ini. Pemerintah tidak mampu mengangkat kesejahteraan rakyat miskin (yang pendapatan perhari kurang lebih 1 dolar), mengapa demikian, jawabanya dari permasalahan-permasalahan ini adalah karena bangsa ini belum sepenuhnya merdeka dari cengkraman para kekuatan asing di bidang ekonomi dan juga dibidang politik, bahkan dibidang pertanian dan keamanan.

Indonesia tidak berani mengambil tindakan untuk menyekamatkan bangsa ini yang sebentar lagi mengalami failed state, mengapa kita tidak berkaca pada Venezuela, Bolivia dan Malaysia, Brazil, Cili dan Norwegia, negara-negara yang berani mengatakan tidak buat imprialisme. Pertambangan yang digarap sendiri oleh pemerintah ternyata menghasilkan dan mendatangkan keuntungan yang lebih besar, dibanding bila diberikan kepada korporasi asing. Negara-Negara Amerika Latin telah dengan jelas menunjukkan bagaimana negosiasi ulang mampu mendatangkan keuntungan jauh lebih banyak dan ternyata tidak ada perjanjian kontrak karya yang tidak dapat dinegosiasikan kembali. Venezuela di bawah Hugo Chaves dan Bolivia

... 1. E. ... Mendapat telah membuktika bahwa Hugo Chaves dengan berani

mengatakan segala bentuk formula kebijakan ekonomi IMF yang ditunjukkan untuk negara-negara berkembang merupakan formula yang akan membuat dan mempertahankan kemiskinan rakyat.

Dari apa yang disampaikan diatas, bahwa para penguasa atau tokoh-tokoh pemerintahan di era Susilo Bambang Yudhoyono sekarang ini jelas telah membuat kebijakan pertambangan, pertanian, pendidikan, kesehatan, perbankan dan hampir semua bidang vital kehidupan nasional yang lainnya cenderung merugikan bangsa indonesia sendiri. Akibat kebijakan yang mengikuti resep neokon dan patuh menjalankan asas pada Washington Cocensus, akibatnya negara dan bangsa telah dirugikan dalam jumlah yang bukan saja puluhan ataupun ratusan, tetapi ribuan triliunan rupiah. Kebijakan ekonomi Susilo Bambang Yudhoyono lebih pro terhadap kepentingan Korporasi asing.

B. RUMUSAN MASALAH

Masalah adalah sebuah kesenjangan atau ketidakcocokan antara sesuatu yang telah direncanakan dengan hasil yang didapatkan atau luput dari rencana tersebut.

Maka dari uraian diatas diambil perumusan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana Pengaruh Paham Neoliberalisme Terhadap Demokrasi Ekonomi dan Politik di Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono 2004-2009”.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa Neoliberalisme memiliki pengaruh yang kuat dalam pembangunan demokrasi ekonomi dan politik di Indonesia
2. Penelitian ini bertujuan untuk bahwa pengaruh Neoliberalisme tidak selalu positif, bahkan cenderung destruktif dalam pembangunan ekonomi dan politik di negara-negara, khususnya dinegara-negara berkembang seperti Indonesia.
3. Penelitian ini bertujuan juga untuk membakar mitos teori pertumbuhan ekonomi pasca Perang Dunia II, tidak sah diterapkan di negara berkembang seperti indonesia.
4. Sebagai sebuah bentuk uji materi terhadap apa yang selama ini penulis dapatkan dalam dunia akademik.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta dapat menjadi bahan dan kajian refrensi bagi khalayak yang pemerhati Neoliberalisme

2. Manfaat Praktis

Maanfap dari penelitian ini, penulis harapkan nantinya mampu menyadarkan dan mampu untuk membebaskan masyarakat dari tekanan

ini diderita bangsa yang kaya ini, bahwa ide tentang kemiskinan yang datangnya dari langit atau Tuhan yang ditijukan buat bangsa kita, yang selama ini dilakukan pembentukan atau pendoktrinan oleh para pelaku-pelaku fundamental dan tradisional Islam atau pelaku-pelaku industrial religi yang mengambil keuntungan dalam kondisi ini. Melalui banyak media fremeing seperti, segmen ceramah setiap subuh di berbagai stasiun televisi, film-film yang bertemakan keislaman, maupun di mimbar-mimbar dakwah yang lain. Inti dalam media diatas adalah bahwa Fungasi dari agama (Islam) hanya sebagai alat penghibur diatas penderitaan umat dan terjebak dalam fiqih klasik apa yang dikatakan Kuhn *normal science* atau ilmu yang normal dalam melihat kondisi sosial kontemporer.

Akhirnya masyarakat mengalami krisis *super ego* meminjam teori struktur psisikis Fruedian, manusia mengalami krisis terhadap kritik kesadaran dirinya dan dunia luarnya, manusia terjebak dalam derama alam bawah sadarnya. Kondisi ini akan memberikan efek domino pada masyarakat islam khususnya, masyarakat menjadi kaku terhadap kondisi sosial, fakta sosial dan prilaku sosialnya yang berhadap-hadapan dengan dirinya, dan akhirnya masyarakat menjadi teralinasi oleh sistem yang mendominasinya.

Dari apa yang telah penulis sampaikan diatas dan merupakan fakta sosial yang dialami masyarakat kita. Pada hakekatnya kemiskinan buakan merupakan takdir Tuhan, tetapi merupakan efeksistem ekonomi yang tidak berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, sehingga agama wajib ikut

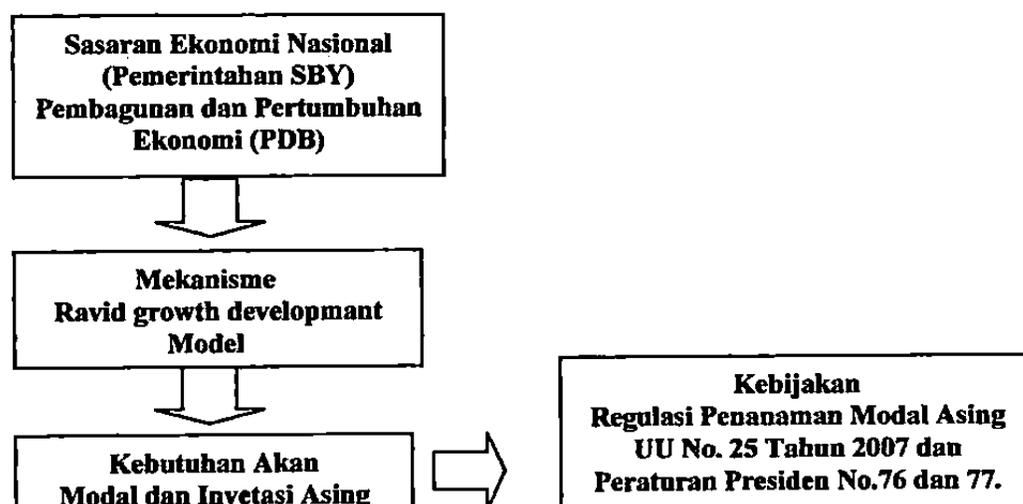
mewujudkan keadilan ekonomi. Islam itu adalah agama yang sangat luas mencakup seluruh kehidupan sosial manusia, Islam adalah Ilmu, sebagai alat perjuangan (perjuangan dalam artian yang universal), sebagai instrumen sosial, Islam memberikan rasa aman dan lain-lain sebagainya. Semoga eksemplar-eksemplar dalam skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya dan masyarakat.

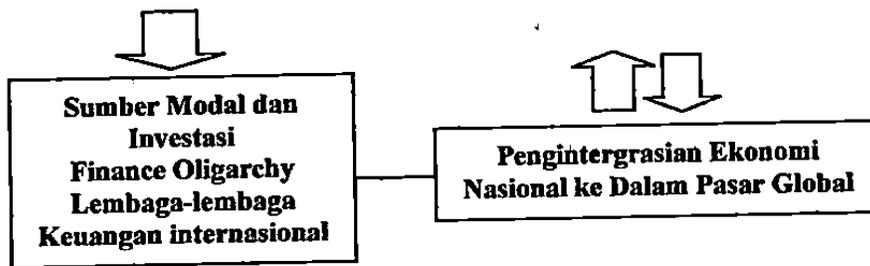
E. Batasan Masalah

Pembatasan Penelitian dibataskan pada : Indikasi-indikasi pengaruh Neoliberalisme dalam Deregulasi Penanaman Modal Asing UU No. 25 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden No. PP No. 76 Tahun 2007, dan PP No. 77 Tahun 2007.

F. Arus Berfikir Skripsi.

Faktor-faktor yang melatar belakangi Regulasi Penanaman Modal Asing UU No. 25 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden No.76/2007 Tentang Bidang Usaha Terbuka dan Bidang Usaha Yang Tertutup Dengan Persyaratan dan Peraturan Presiden 77/2007 Tentang Bidang Usaha Terbuka Dengan Batas kepemilikan Modal Asing





Keterangan :

-  : Merupakan efek dari penerapan Pembangunan makro ekonomi
-  : Dampak dari UU No. 25 Tahun 2007 dan PP No. 76 dan 77
-  : Merupakan syarat penyesuaian struktural dari Finance Oligarchy.

G. Kerangka Dasar Teori

Teori merupakan titik tolak berpijak bagi langkah selanjutnya agar pembahasan tidak menentang dari topik yang akan diteliti, teori juga merupakan salah satu unsure penelitian yang penting untuk menerangkan fenomena sosial yang menjadi perhatian. Menurut Kerlinger menyatakan bahwa teori adalah sekumpulan konsep, definisi dan proposisi yang saling kait-mengkait yang menghadirkan suatu tinjauan secara sistematis atau fenomena yang ada dengan menunjukkan secara spesifik hubungan-hubungan diantara variable yang terkait dengan fenomena dengan tujuan memberikan eksplanasi dan prediksi atas fenomena tersebut¹⁵.

1. Neo-liberalisme Sebagai anak Kandung Kapitalisme

Neoliberal merupakan suatu perwujudan atau konsep yang baru dari faham kapitalisme saat ini dapat dikatakan telah menguasai sistem

perekonomian dunia. Neoliberalisme bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan kekuasaan pasar atau perdagangan bebas (pasar bebas), dengan pembenaran yang mengacu pada kebebasan. Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi liberal yang mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang meminimalisir dan juga menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Paham ini memfokuskan pada pasar bebas, pembatasan yang sedikit oleh perilaku bisnis dan hak-hak pribadi. Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri dengan mekanisme politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan intervensi militer, guna untuk mencapai tujuannya.

Semua mekanisme yang dan proses globalisasi yang diperjuangkan oleh aktor-aktor globalisasi yakni TNCs, Bank Dunia, IMF melalui kesepakatan yang dibuat di WTO sesungguhnya dilandaskan dengan pada suatu ideologi yang dikenal dengan neo-liberalisme. Paham neo-liberalisme secara prinsipil sebenarnya tidak jauh berbeda dengan paham liberalisme yang lama, hanya saja karena waktu, konteks pemunculan kembali serta skala dan strategi yang berbeda sudah tentu jawabannya berlainan. Dengan demikian neo-liberalisme merupakan kembalinya paham liberalisme lama di era yang baru.

Para penganut paham ekonomi neo-liberalisme percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai sebagai hasil normal dari kompetisi bebas. Kompetisi yang agresif adalah akibat dari kepercayaan bahwa pasar bebas adalah cara efisien dan tepat untuk mengalokasikan sumber daya alam rakyat

menjadi indikator apakah sumber daya telah habis atau masih banyak. Kalau harga murah itu persediaan memadai. Harga mahal berarti produksinya mulai langka. Harga tinggi maka orang akan menanam modalnya ke sana. Oleh sebab itu, harga menjadi tanda apa yang harus diproduksi. Itulah alasan mengapa neo-liberalisme ekonomi tidak ingin pemerintah ikut campur dalam, menyerahkan seluruh mekanisme dan hukum pasar untuk bekerja. Keputusan individu atas interes pribadi diharapkan mendapat mimbingan dari *invisible hand*¹⁶ sehingga masyarakat akan mendapat berkah dari ribuan keputusan individu tersebut. Pada akhirnya kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang tersebut akan *trickel down*¹⁷ kepada anggota masyarakat yang lain. Oleh karena itu, sedikit orang tersebut harus difasilitas, dilindungi dan bebas dari beban pajak. Pendirian neo-liberalisme ini pada prinsipnya tidak bergeser dari paham liberalisme yang di gagas oleh Adam Smith dalam *The Wealt of Nations* (1776). Akan tetapi krisis krisis yang berkepanjangan yan .menimpa kapitalis pada awal abad 19, yang berdampak pada depresi ekonomi tahaun 30-an telah mengakibatkan tenggelamnya paham liberalisme dan akibatnya pendulum beralih dengan memperbesar peran pemerintah terutama sejak Rossevelt dengan gagasan *New Deaalnya* tahun 1935¹⁸. Tetapi dalam perjalanan kapitalis selanjutnya pada akhir abad 20 terakhir pertumbuhan dan akumulasi kapital dari golongan kapitalis menjadi lambat dan salah satu hambatannya adalah proteksi, paham keadilan sosial,

¹⁶ Masour Fakh. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar dan Insist Press. 2008. Hal217

¹⁷ Trickle down dimaksudkan para kapitalis akan memberikan kekayaan pada anggota masyarakat yang

kesejahteraan sosial, kesejahteraan bagi rakyat, dan berbagai tradisi adat pengolahan sumber daya alam berbasis kerakyatan dan sebagainya. Untuk itu kapitalisme memerlukan formulasi baru untuk mempercepat pertumbuhan dan akumulasi kapital untuk dan strategi yang ditempuh adalah menyingkirkan segenap rintangan bagi investasi pasar bebas. Gagasan perlindungan hak milik intelektual, *good governance*, penghapusan subsidi, program proteksi pada rakyat, deregulasi, pungutan civil society, program anti korupsi dianggap sebagai program yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk itu diperlukan suatu tatanan perdagangan global, dan sejak itulah lahirnya globalisasi pada dasarnya berpijak pada kebangkitan kembali paham liberalisme, suatu paham yang dikenal sebagai neo-liberalisme.

Apa yang menjadi pendirian neo-liberalisme dicirikan sebagai berikut : kebijakan pasar bebas yang mendorong perusahaan-perusahaan dan pilihan konsumen, penghargaan atas tanggung jawab personal dan inisiatif kewiraan, serta menyingkirkan birokrasi dan parasit pemerintah yang tidak pernah mampu, meskipun dikembangkan. Aturan dasar kaum neo-liberalisme adalah meliberalisasikan perdagangan dan finansial, biarkan pasar yang menentukan harga, akhiri inflasi, (stabilitas ekonomi makro, dan privatisasi) kebijakan pemerintah yang memproteksi rakyat haruslah dilenyapkan karena akan mengganggu kerja pasar. Paham inilah yang saat ini mengelobal dengan mengembangkan konsensus yang dipaksakan yang dikenal dengan globalisasi sehingga terciptanya suatu tata dunia . Arsitektur ini ditetapkan dengan apa yang kita kenal dengan sebagai “ The Neoliberal Consensus” yang terdiri dari

perusahaan besar yang mengontrol dan menguasai ekonomi internasional dan memiliki kekuasaan untuk mendominasi informasi kebijakan dalam membentuk opini publik.

Secara lebih spesifik, pokok-pokok pendirian neolib meliputi, *pertama* bebaskan perusahaan swasta dari campur tangan pemerintah, misalnya jauhkan pemerintah mengintervensi dibidang perburuhan, investasi, harga, serta biarkan mereka mempunyai ruang untuk mengatur diri sendiri¹⁹, untuk tumbuh dengan menyediakan kawasan pertumbuhan. *Kedua*, hentikan subsidi negara kepada rakyat, karena hal itu selain bertentangan dengan prinsip menjauhkan campur tangan pemerintah juga bertentangan dengan prinsip pasar bebas. *Ketiga*, Penghapusan ideologi “kesejahteraan bersama” dan pemilikan komunal seperti yang masih banyak dianut masyarakat tradisional. Paham kesejahteraan bersama dan kepemilikan komunal dianggap akan menghalangi pertumbuhan. Akibat dari prinsip tersebut adalah biarkan sumber daya alam diserahkan pada ahlinya, dan bukan pada masyarakat tradisional.²⁰

2. Ekonomi Politik mazhab Sosialisme

Perkembangan paham sosialisme sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari fase perkembangan paham kapitalisme. Adam Smith pada abad-XIX menetapkan mode untuk pembangunan kapitalisme yang terus berlangsung

¹⁹ Pemerintah tidak boleh membuat kebijakan untuk melindungi buruh seperti upah dan kelayakan hidup buruh, sedangkan bidang investasi, pemerintah harus membebaskan pajak setiap pemodal yang menanamkan investasinya di suatu negara, dan dibidang harga biarkan pasar yang menentukan harga, (fenomena naik turunnya BBM) fungsi pemerintah sebagai anjing penjaga dengan dukungan aparat-aparat militernya.

²⁰ Ibid hal219

hingga detik ini. Pilar kelembagaan kapitalisme tersebut dianggap oleh Karl Marx (seorang nabi sosialis) sangat eksploitatif karena menepatkan buruh atau tenaga kerja sangat eksploitatif karena menempatkan tenaga kerja subordinat ketika berhadapan dengan pemilik modal. Hal ini bisa terjadi karena, dalam kapitalisme penciptaan perantara-perantara faktor produksi selalu terlambat ketimbang percepatan produksi (teknologi).

Dalam terminologi ekonomi, perantara faktor-faktor produksi tersebut adalah kelembagaan yang mengatur interaksi antara pemilik modal, tanah, dan tenaga kerja. Dalam masa klasik kuno, kelembagaan faktor-faktor produksi lebih banyak menguntungkan para pemilik tenaga kerja (budak), sementara pada zaman feodalisme keuntungan tersebut banyak dipungut oleh para tuan tanah, dan pada zaman kapitalis dewasa ini pemegang kebijakan atas profit terbesar adalah pemilik modal. Persoalannya adalah, ketika inovasi produksi dilakukan pembagian keuntungan atas kegiatan ekonomi selalu tidak bisa jatuh secara proposional kepada masing-masing pemilik faktor produksi, sepanjang perantara kelembagaan faktor-faktor produksi tidak mendukung hal itu. Dalam konteks ini Marx berkesimpulan bahwa perkembangan infrastruktur (inovasi teknologi/lat-alat produksi) selalu tidak diikuti dengan penataan suprastruktur (faktor-faktor produksi), dan itu berlangsung sepanjang usia peradaban ini.²¹

²¹ Ahmad Erani Yustika, *EKONOMI POLITIK, Kajian Teoritis dan Analisa Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009.hal 39

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut, maka paham ekonomi sosialis merupakan kritik keras terhadap paham kapitalisme. Bagi Sistem ekonomi sosialis, meletakkan faktor-faktor produksi dibawah kontrol negara. Keputusan investasi dan produksi tidak dilakukan melalui pasar dan para kapitalis (sektor privat), tetapi berdasarkan perencanaan terpusat. Perencanaan tersebut isinya meliputi target tingkat pertumbuhan tingkat nasional dan perangkat yang dibutuhkan untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Negara dalam mendisain dan mengimplementasikan rencana harus terlebih dahulu mempertimbangkan seluruh kebutuhan warga negrannya, berdasarkan dengan sumber daya yang dimiliki berbasiskan tindakan kolektif daripada kepentingan privat. Sebagai contoh, misalnya pada konstitusi kita dalam agenda mengenai sistem perbankan yang terpusat dan *land reform*.

Hal terpenting lainnya, sistem ekonomi sosialis didasarkan pada adanya nilai-nilai lain yang pantas dipertimbangkan, selain aspek pertumbuhan/profit, sebagai contoh, dimana kepemilikan produktif sektor swasta dikontrol oleh negara, baik dalam bentuk upah buruh. Sehingga diharapkan tidak terjadi eksploitasi pemilik modal terhadap buruh. Lebih dari itu sistem ekonomi sosialis menyediakan kebutuhan dasar (*provision basic need*) secara struktural lebih mungkin, karena produksi dikerjakan tidak semata-mata untuk tujuan laba. Dengan begitu, melalui skema tersebut, model pembangunan dibawah model ekonomi sosialis lebih stabil, rasional dan lebih memperhatikan tujuan kesejahteraan dan keadilan kolektif berdasarkan

Dapat disimpulkan bahwa mazham ekonomi sosialisme hanya didasarkan pada dua prinsip. *Pertama*, negara menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk mengerakan kegiatan ekonomi, seperti investasi (pembiayaan negara), dari awal perencanaan, oprasional, pengawasan, sampai ke evaluasi. Pada level ini fungsi negara merancang sistem kepemilikan, proses transaksi dan pembagian keuntungan berbasiskan instrumen negara. Jadi dalam kasus hak kepemilikan negara buakan hanya mengontrol, tetapi juga menguasai hak kepemilikan.²² Contoh, pada UUD pasal 33. Dengan prosudur inilah negara berharap pemerataan pendapatan bisa dicapai. *Kedua*, pelaku ekonomi tidak membuat kesepakatan dengan pelaku ekonomi lainnya. Tetapi setiap pelaku ekonomi membuat kontrak dengan negara sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan model seperti ini diharapkan tidak adanya eksploitasi pemilik modal terhadap tenaga kerja, seperti dalam sistem ekonomi kapitalisme. Pada level ini pula ketimpangan pendapatan antara pelaku ekonomi juga tidak akan terjadi.²³

3. Konsep Legitimasi Kekuasaan.

Kekuasaan merupakan suatu kondisi yang memunculkan dua pemahaman. *Pertama*, tentang orang yang mendapatkan kekuasaan dan kedua pemahaman tentang orang yang dikuasai, atau tunduk pada kekuasaan. Pemahaman sentral yang berkenaan dengan ini berkisar pada sumber

seseorang untuk tunduk pada kekuasaan yang maknanya adalah pembatasan dan bahkan menerima tekanan pada sisi yang lain.

Didalam bahasa sederhana, sebagaimana dikemukakan para pakar setelah mengkaji pengertian kekuasaan dari para ahli pendapat bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Apabila dirinci secara lanjut maka kekuasaan itu terdapat dalam berbagai lini kehidupan, baik dalam kehidupan komunal maupun dalam kehidupan individual.²⁴

Keabsahan atas kekuasaan merupakan suatu legitimasi untuk melakukan tindakan yang dalam tataran objektif tidak bisa seperti itu. Dalam artian tanpa adanya legitimasi kekuasaan seseorang, baik secara pribadi maupun komunal (kelembagaan) tidak akan dapat dilaksanakan. Legitimasi ini sangat penting maknanya sebagai dasar dari kekuasaan²⁵. Hal ini berlaku disemua lingkungan masyarakat tidak terkecuali dalam lembaga-lembaga penting yang oleh masyarakat diakui sah eksistensinya. Misalnya dalam Keluarga (kekuasaan orang tua), agama (kekuasaan rohani-moral), Kekuasaan lembaga fungsional (atas dasar hubungan kerja), dan kekuasaan dalam negara (kekuasaan dalam politik)²⁶.

Legitimasi sebagai dasar dari berfungsinya kekuasaan bisa bermacam-macam. Kekuasaan bisa berlangsung dalam didalam keluarga (kekuasaan

²⁴ Samsul Wahidin, *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.

²⁵ Ibid, Hal2

²⁶ Dalam istilah Pierre Bordieu Kuasa simbol, contoh kecil, orang tua dan anaknya, anak dalam level ini harus patuh terhadap perintah orang tuanya, dalam hal ini ada kekuasaan simbol yang bekerja secara

orang tua terhadap anaknya), kekuasaan yang bersumber pada kepercayaan atau agama dan kultur kebudayaan. Ada juga kekuasaan yang legitimasinya didapatkan dari hubungan secara fungsional seperti kekuasaan yang timbul karena hubungan pekerjaan, kekuasaan yang timbul dari hubungan birokrasi dan sebagainya. Juga ada kekuasaan yang timbul dari legitimasi politik dan inilah yang mendasari kekuasaan dalam suatu negara untuk melaksanakan kehendak kepada rakyatnya.

Dalam perspektif yang lebih teknis, rincian dari sumber kekuasaan khususnya secara formal administratif ada enam sebagai berikut :*Pertama*, Kekuasaan balas jasa (*reward power*) yaitu kekuasaan yang legitimasinya bersumber dari sejumlah balas jasa yang sifatnya positif (uang, perlindungan, perkembangan karier, janji positif dan lain sebagainya) yang diberikan kepada pihak penerima guna melaksanakan perintah atau persyaratan lain. Faktor ketundukan seseorang pada kekuasaan dimotivisir oleh hal itu dengan harapan jika telah melaksanakan sesuatu akan memperoleh seperti apa yang dijanjikan.

Kedua, Kekuasaan paksaan (*coercive power*) berasal dari perkiraan yang dirasakan orang bahwa hukum (dipecat, ditegur, ditenda, dijatuhkan hukuman fisik dan sebagainya) akan diterima jika mereka tidak melaksanakan perintah pemimpin. Kekuasaan akan mejadi motivasi yang bersifat revresif terhadap kejiwaan seseorang untuk tunduk pada kekuasaan pemimpin itu dan melakukan seperti apa yang dikehendaki.

Ketiga, Kekuasaan legitimasi (*legitimate power*) kekuasaan yang

dan sering bersifat konvensional bahwa seorang pemimpin mempunyai hak sah untuk mempengaruhi bawahannya. Sementara itu pada sisi lain seseorang mempunyai kewajiban untuk menerima pengaruh itu, karena seseorang lainnya ditentukan sebagai pemimpinnya sedangkan dirinya sebagai bawahan atau yang dikuasai. Legitimasi kekuasaan yang demikian bisa atas dasar aturan formal, tetapi bisa juga bersumber dari pada kekuasaan yang muncul karena kekuatan ilmiah dan kekuatan akses dalam pergaulan bersama yang mendudukan seseorang beruntung memperoleh legitimasi suatu kekuasaan.

Keempat, Kekuasaan pengendalian terhadap informasi (*control of information power*), kekuasaan ini ada dan berasal dari kelebihan atas suatu pengetahuan dimana orang lain tidak mempunyai. Cara ini digunakan dengan pemberian atau penahanan informasi yang dibutuhkan orang lain yang mau atau tidak mau tunduk pada (secara terbatas) pada kekuasaan pemilik informasi. Pemilik informasi dapat mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peredaran informasi, atas legitimasi kekuasaan yang dimilikinya.

Kelima, Kekuasaan panutan (*refren power*) kekuasaan ini muncul atas pemahaman secara kultural dari orang-orang dengan yang berstatus sebagai pemimpin. Masyarakat menjadikan pemimpin itu sebagai panutan atau simbol dari perilaku mereka. Aspek kultural yang biasanya muncul dari pemahaman religiusitas direfleksikan pada kharisma pribadi, keberanian, sifat simpatik dan sifat-sifat lain yang tidak ada pada kebanyakan orang. Hal ini menjadikan orang lain tunduk pada kekuasaannya,

Keenam, Kekuasaan keahlian (*expert power*) kekuasaan ini ada dan

atau ilmu pengetahuan. Kelebihan ini akan menjadikan seorang yang memilikinya menjasi *winasis* dfan secara ilmiah bekedudukan sebagai sebagai pemimpin dalam bidang keahliannya itu. Sang pemimpin bisa merefleksikan kekuasaannya dengan batas-batas keahlinya itu dan secara terbatas pula orang tunduk pada kekuasaan yang bersumber dari keahlian yang dimiliki, karena adanya kepentingan terhadap keahlian seorang pemimpin²⁷.

3. Demokrasi Ekonomi dan Politik.

a) Arti Demokrasi

Membahas demokrasi sebagi bagian dari wacana politik yang banyak diperbincangan orang baik itu aktivis, politisi, akademisi dan kalangan ilmuan sosial, ekonomi dan politik. Istilah ini juga didambakan semu orang, terutama orang yang mempunyai kesadaran politik, untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bahwa demokrasi akan lebih membawa kemashalatan manusia ketimbang implikasi negatifnya, yakni mahal dan kompleksnya dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Ide tentang demokrasi diciptakan bukan dari ruang yang nihil, namun ide demokrasi itu tercipta dari kondisi sosial dan fakta sosial yang sedang terjadi, sehingga para pemikir merekonstruksi ide tentang demokrasi. Demokrasi merupakan jawaban untuk membebaskan masyarakat manusia, yang pada saat itu, umat manusia mengalami penderitaan akibat penindasan para penguasa yang mengakui dirinya sebagai wakil Tuhan di muka bumi.

²⁷ Ibid. Hal 3-6

Para penguasa itu mengaku bahwa mereka memerintah manusia atas perintah Tuhan, sehingga Tuhanlah yang memberi legitimasi kekuasaan kepadanya. Terdapat status sosial ditengah-tengah masyarakat, kaum-kaun status qua terdiri dari kelas bangsawan, feodal dan teknokrat, dimana kelas ini yang mempunyai akses untuk menguasai politik dan pemerintahan, sedangkan kelas buruh, petani dan nelayan tidak ada hak untuk ikut dalam proses politik.

Kondisi sosial diatas tersebut yang memacu para pemikir-pemikir klasik untuk menggagas ide tentang demokrasi. Demokrasi yang merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ini berarti bahwa rakyat dalam sebuah kelompok masyarakat menyatukan dirinya membentuk keinginan publik, serta setiap individu bersepakat untuk membentuk suatu komunitas dimana mereka hidup didalamnya, sehingga mereka bisa menentukan nasib mereka sendiri. Kesepakatan tersebut sering disebut dengan Kontrak Sosial²⁸. Setiap individu atau warga negara memiliki hak yang sama atas warga negara yang lain dalam menentukan masalah-masalah kenegaraan, seperti dalam hal memilih pemimpin negara, dan menyusun hukum dan perundang-undangan negara. Dengan demikian berdasarkan kesepakatan kontrak sosial, maka setiap individu menyerahkan semua haknya kepada kesepakatan komunitas inilah yang dinamakan dengan demokrasi²⁹.

²⁸ Dari kontrak sosial ini muncul suatu bangunan atau konsep kolektif yang berupa bangunan politik atau suatu negara, berbentuk republik atau bentuk negara lainnya sesuai dengan kontrak sosial yang membelakanginya.

²⁹ Alvin T. Sison, *Demokrasi Politik dalam Sejarah*, Al Iqrah, 2001, Hal 108

Dikarenakan demokrasi bukan produk ide yang statis, maka demokrasi mengalami perkembangan lebih lanjut, Demokrasi yang merupakan wacana dari teori politik, Sumbangan yang komperhensif dari perkembangan demokrasi datang dari Pemikir asal Prancis yaitu Baron de Montesqui (1689-1755). Montesqui terkenal dengan konsep tentang pemisahan kekuasaan konstitusi, untuk meminimalisir despotisme dalam menjalankan kekuasaan dan membentuk suatu pemerintahan yang moderat³⁰. Doktrin trias politika ini menjadi ideologi yang melembaga yang digunakan negara-negara yang menganut paham demokrasi, Indonesia adalah salah satu negara yang mengadopsi konsep dari Montesqui. Dalam Konsepnya ia membagi kekuasaan konstitusi dalam tiga bagian yang independen yang terkenal dengan Trias Politika yaitu legislatif, yudikatif dan eksekutif. Fungsi politik biasanya diklasifikasi sebagai legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan meletakkan setiap kategori fungsional pada lembaga pemerintah yang berbeda, monopoli otoritas oleh suatu orang atau suatu kelompok bisa dihindari, dan kondisi kebebasan politik bisa dijamin lebih baik. Karena

Ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif berada pada orang yang sama, atau ada pada lembaga kehakiman, tidak bisa ada kemerdekaan, juga tidak ada kemerdekaan jika kekuasaan kehakiman tidak terpisah dari legislatif dan eksekutif. Jika kehakiman dan legislatif digabung maka kehidupan dan kebebasan subyek akan berada dibawah kontrol yang sewenag-wenang karena hakim juga akan menjadi legislator (pembuat undang-undang). Jika ia

³⁰ Kebanyakan orang mengatakan trias politika adalah konsep, tetapi menurut penulis trias politika

digabung dengan kekuasaan eksekutif, hakim akan bertindak dengan kekerasan dan penindasan.³¹

Ketiga pilar itu merupakan suatu negara demokrasi, kekuasaan legislatif merupakan lembaga wakil-wakil rakyat, kekuasaan yudikatif adalah lembaga kehakiman yang menerapkan hukum dan perundang-undangan, sedangkan lembaga eksekutif adalah lembaga yang menerapkan keputusan lembaga kehakiman dan perundang-undangan yang disusun lembaga parlemen. Ketiga kekuasaan itu bersifat independen, dan tidak saling mencampuri urusan masing-masing lembaga.

b) Demokrasi Politik

Apa yang sudah penulis sampaikan diatas merupakan arti dari demokrasi, namun demokrasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi demokrasi harus mempunyai persyaratan empirik. Dalam pemahaman demokrasi normatif, demokrasi merupakan suatu yang secara idil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya ketika mengenal ungkapan "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat"³². Ungkapan normatif tersebut, biasanya diterjemahkan dalam kontitusi pada masing-masing negara yang negara yang menjalankan sistem demokrasi. Misalnya saja dalam Undang-undang dasar 1945 bagi pemerintahan Indonesia. Namun apa yang terlihat secara normatif belum tentu dapat dilihat dalam kontek kehidupan sehari-hari di dalam suatu negara. Oleh karena itu, sangat

³¹ Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik, Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Moderen*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005. Hal374

perlu untuk melihat bagaimana makna demokrasi secara empirik, yakni demokrasi dalam kehidupan politik praktis.

Pemahaman demokrasi dalam konteks empirik ini memungkinkan kita untuk mengamati, apakah dalam suatu sistem politik pemerintahan memberikan ruang gerak bagi warga masyarakat untuk melakukan partisipasi guna memformulasikan preferensi politik mereka melalui organisasi politik yang ada. Disamping itu, kita diperkenankan untuk mengamati sejauh mana kompetisi para pemimpin dilakukan secara teratur (*regulasi basis*) untuk mengisi jabatan politik.³³

Robert Dahl mempersyaratkan sejumlah kriteria untuk melihat apakah demokrasi Politik order sangatlah bermanfaat untuk dijadikan kerangka acuan untuk mengamati ada tidaknya demokrasi diwujudkan dalam suatu pemerintahan negara. Dahl mengajukan indikator bagi demokrasi secara empirik, Dapat disimpulkan Political order merupakan sistem yang demokratis atau tidak, yaitu :

- i. Akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus bisa mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggung jawabkan ucapan atau kata-katanya. Dan yang tidak kalah pentingnya perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang, bahkan akan dijalannya. Pertanggung jawaban itu tidak hanya menyangkut dirinya, tetapi juga menyangkut keluarga dalam arti yang luas. Dalam konteks ini pemegang jabatan harus bersedia menghadapi

³³ Ibid Hal5

apa yang disebut dengan "*publik Scrutiny*", terutama yang dilakukan oleh media masa yang ada.

- ii. Rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi, tidak hanya satu orang yang memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Biasanya, partai-partai politik yang menang pada suatu pemilihan umum akan diberi kesempatan untuk membentuk eksekutif yang mengendalikan pemerintahan sampai pada pemilihan berikutnya. Dalam suatu negara pada tingkat demokrasisnya masih rendah, rotasi kekuasaan biasanya rendah pula. Bahkan peluang untuk rotasi sangat terbatas. Kalaupun ada, hal itu hanya dilakukan dalam lingkungan yang terbatas dikalangan elit politik saja.
- iii. Rekrutmen yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan suatu sistem rekrutmen yang terbuka, dalam artian setiap orang yang memenuhi syarat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut. Dalam negara yang tidak demokrasi, rekrutmen politik biasanya dilakukan secara tertutup. Artinya peluang untuk mengisi jabatan politik hanya dimiliki oleh beberapa golongan orang saja.
- iv. Pemilihan Umum. Dalam suatu negara yang demokratis, pemilu dilakukan secara teratur. Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya.

didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti segala macam aktivitas pemilihan, termasuk didalamnya kegiatan kampanye dan menyaksikan perhitungan suara.

- v. Menikmati hak-hak dsar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk didalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat (*freedom of ekprssion*), hak untuk berserikat dan berkumpul (*freedom of assembly*), dan hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom of pres*). Hak untuk menyatakan pendapat dapat digunakan untuk menentukan preferensi politiknya, tentang suatu masalah, terutama yang menyangkut dirinya dan masyarakat disekitarnya, dengan kata lain, setiap warga negara mempunyai hak untuk ikut menentukan agenda apa yang diperlukan. Hak untuk berkumpul dan berserikat dapat diwujudkan dengan memasuki organisasi – organisasi politik maupun organisasi non politik, tanpa dihalang-halangi oleh orang siapapun dan intusi manapun. Kebebasan pers dalam masyarakat yang demokratis, mempunyai makna bahwa masyarakat dunia pers dapat menyampaikan informasi apa saja yang dipandang perlu, sepanjang tidak mempunyai alam menahina menahant ataupun menahdu danba

c) Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi atau lebih dikenal dengan sebutan ekonomi kerakyatan³⁵ telah mengalami pemaknaan yang kabur ditengah masyarakat awam, ini dikarenakan pengaruh resistensi penganut paham ekonomi neoliberal, dan juga kecendrungan mengalami politisi dari para petinggi negara, dengan dalih untuk mementingkan perekonomian rakyat, namun ideologi ekonomi yang digunakan untuk membangun perekonomian adalah ideologi neoliberal. Tentu bagi masyarakat awam percaya dengan begitu saja dalil-dalil dari elit petinggi negara tanpa menafsirkan secara kritis, ini disebabkan karena masyarakat lapisan bawah hanya membutuhkan *basic of need*. Untuk melakukan distansi dengan realitas untuk refleksi dan kontemplasi yaris tidak mungkin³⁶.

Demokrasi ekonomi atau demokrasi kerakyatan ini pada dasarnya merupakan pijakan perekonomian negara Indonesia ini terbukti pada penjelasan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 :

“ Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, reproduksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Bagunan perusahaan yang sesuai dengan ini adalah koperasi³⁷ .

³⁵ , menurut penulis, pada dasarnya sistem perekonomian ini diadopsi dari ideologi sosialisme, yang menekankan pada kepemilikan komunal sebagai landasan kedaulatan perekonomian masyarakat. Namun agar tidak terkesan etnosentrisme, pandangan ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi sosial masyarakat Indonesia, tokoh yang memperkenalkan pandangan ini dan sekaligus menjadikan sebagai landasan perekonomian indonesia adalah Bung Hatta.

³⁶ Rakyat kecil tidak mungkin mampu melakukan hal ini (yakni kritis terhadap kekuasaan), hal ini terjadi karena propokasi daripada aktor-aktor intelektual, dan masyarakat kecil lebih condong kepada bagaimana bisa mempertahankan kebutuhan pokok sehari-hari mereka.

Berdasarkan bunyi pengalihan kalimat dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 itu, dapat diketahui secara substansial demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan sesungguhnya mencakup tiga hal berikut : *Pertama*, adanya Partisipasi penuh seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional. Ini dimungkinkan sebab hanya dengan cara demikian seluruh anggota masyarakat dapat turut mendapat bagian dari hasil produksi nasional itu. Sebab itu, Pasal 27 UUD 1945, dengan tegas dinyatakan bahwa “ tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. *Kedua*, keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional tersebut. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, tidak boleh ada satu orang anggota masyarakat pun yang tidak turut menikmati hasil dari produksi nasional, termasuk para fakir miskin dan anak-anak telantar diplihara oleh negara. Dengan kata lain, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, negara wajib menyelenggarakan sistem jaminan sosial, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak telantar. *Keempat*, kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional itu harus berlangsung dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, anggota masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek perekonomian. Setiap anggota masyarakat harus diupayakan agar menjadi

nasional dilakukan oleh para pemodal asing, namun kegiatan itu harus tetap berada dibawah pengawasan atau pengendalian masyarakat³⁸.

Berdasarkan Agenda-agenda Demokrasi ekonomim atau ekonomi kerakyatan mencakup semua bidang dan aspek perekonomian. Dapat Disimpulkan Agenda-agenda Demokrasi ekonomi atau demokrasi kerakyatan meliputi : Pada sektor fiskal, misalnya, ia dapat diterjemahkan dengan melakukan pembagian pendapatan (*revenue Sharing*) antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pada sektor perbankan, dapat diterjemahkan melalui penyelenggaraan sistem perbankan regional (*ragional banking system*), yaitu sebagai pengganti perbankan yang tersentralisasi (*centralized banking system*). Sedangkan pada pembuatan utang luar negeri, ia dapat diterjemahkan melalui penyelenggaraan refrendum terhadap setiap rencana proyek pembangunan yang hendak dibiayai dengan utang luar negeri.³⁹

Berdasarkan Komitmen demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan terhadap penguatan ekonomi rakyat, diterjemahkan melalui pelaksanaan demokratisasi penguasaan modal. Yang dimaksud dengan modal dalam hal ini mencakup baik modal material (*material capital*), modal intelektual (*intelektual capital*), maupun modal internasional (*institusional capital*)

dapat disimpulkan sebagaim berikut :

- i. Program demokrasi modal material antara lain dapat dilakukan dengan melaksanakan program *land reform* pada sektor pertanian, atau

³⁸ Ibid Hal252

³⁹ Ibid Hal240

Membahas Represif Aparatus Negara dan Aparatus Ideologi Negara tidak terlepas dengan konsep negara yang di teorikan oleh Marx dan penerus Ideologi Marxs. Dalam teori negara Marx berpendapat bahwa negara merupakan alat dari kelas yang berkuasa, yakni kelas bangsawan dinegara feodal dan pemilik modal pada negara kapitalis. Negara secara eksplisit dipandang sebagai aparatur represif yang memungkinkan kelas-kelas penguasa untuk mendominasi kelas buruh (eksploitasi kapitalis).

Represif Aparatus Negara (RSA) terdiri atas : Pemerintahan, Birokrasi, Tentara, Polisi, Peradilan, Penjara dan sebagainya. Represif disini menyatakan bahwa Aparatus Negara menjalankan fungsinya dengan kekerasan (karena ada represi, sebagai misal represi administratif, yang mengambil bentuk-bentuk non-fisik)

Aparatus Ideologi Negara (ISA) dimana realitas-realitas itu akan terlihat dengan begitu gamblang bagi pengamat langsung dalam bentuk-bentuk institusi-institusi yang berbeda-beda dan terspesialisasi. Daftar empiris dari institusi-institusi ini adalah antara lain : Institusi keagamaan, institusi pendidikan (sistem persekolahan negeri dan swasta yang bermacam-macam), keluarga, institusi hukum, institusi politik (sistem politik, termasuk partai-partai politik yang beraneka ragam), serikat buruh, institusi komunikasi (pers, televisi dan lain sebagainya) dan institusi kebudayaan⁴¹.

Represif aparatur negara dan aparatur ideologi negara memiliki perbedaan yang esensial dilihat dari fungsinya, Perbedaan RSA dan ISA

adalah : Aparatus Represif Negara menjalankan fungsinya dengan kekerasan sementara Aparatus Ideologi Negara menjalankan fungsinya dengan ideologi

Peran aparatus represif negara, sepanjang dia menjalankan perannya sebagai aparatus yang represif, pada esensinya terdiri dari pelanggaran secara paksa (baik bersifat fisik maupun tidak) kondisi-kondisi politik yang diperlukan bagi reproduksi relasi-relasi produksi, yang pada intinya merupakan relasi-relasi eksploitasi. Bukan hanya aparatus Negara itu turut terlibat dengan senang hati dalam reproduksi dirinya sendiri (karena negara kapitalis terdiri atas atau menguasai dinasti-dinasti politik, dinasti-dinasti militer, dan sebagainya), namun juga terutama aparatus negara melanggengkan dengan represi, (dari mulai dengan kekuatan fisik yang paling brutal, via sekedar komando dan larangan administrasi, sampai dengan tindakan penyensoran secara terbukamaupun diam-diam) kondisi-kondisi politik bagi pelaksanaan aksi Aparatus Ideologis Negara.⁴²

Sedangkan peran dari aparatus Ideologi Negara, apapun intitusinya menjalankan dan turut berperan atas hasil yang sama yaitu, reproduksi relasi-relasi produksi, yang tak lain adalah eksploitasi kelas dominisasi. Setiap aparatus tersebut menjalankan peranannya masing-masing. Aparatus politik menjalankan peranannya dengan cara memduduki individu-individu dalam ideologi politik negara, Aparatus agama menjalankan peranannya dengan kutbah-kutbah yang mendukung segala agenda politik, sehingga masyarakat percaya dengan, begitu pula di mempercayai agamanya, Aparatus

pada produk-produk kapital yang sebenarnya masih tabu dengan kultur budaya lokal, dan Aparatus pendidikan menjalankan peranannya dengan memasukan atau menanamkan pengetahuan praktis yang menjadi pembungkus ideologi yang berkuasa, dalam rangka mencapai rasional bertujuan.

Peranan Aparatus institusi komunikasi dengan cara memberikan doktrin faham-faham idologi melalui alat-alat komunikasi, seperti sarana-sarana pers, radio, dan televisi, yang dapat mempengaruhi subyektivitas terhadap pandangan dunia sosialnya.

Pandangan diatas telah mengarahkan kita pada untuk memahami apa yang sebenarnya membentuk kesatuam diantara lembaga-lembaga Aparatus Ideologi Negara yang kelihatanya terpisah-pisah, jika AIN-AIN berfungsi secara masif dan terutama menggunakan ideologi, apa yang menyatukan keberagamaman lembaga-lembaga aparatus Ideogi Negara itu adalah pelaksanaan fungsi tersebut karena ideologi yang mereka jalankan adalah sama, yaitu ideologi itu adalah ideologi yang berkuasa. Atas berdasarkan fakta bahwa kelas yang berkuasa secara prinsip merupakan pemegang kekuasaan Negara, baik secara terbuka maupun yang lebih sering dengan cara membentuk aliansi diantara kelas atau fraksi-fraksi kelas, dan karena itu mengendalikan Aparatus Negara (Represif), dan fakta bahwa kelas yang berkuasa itu pula yang aktif dalam Aparatus Ideologi Negara (ISA)⁴³.

Dalam pelaksanaan fungsi ganda, dengan cara represi dan dengan cara

... .. dijalankan oleh Aparatus Negara ataupun

Aparatus Ideologi Negara menurut pandangan Altusser, memperlihatkan dengan jelas bahwa bisa jadi ada kombinasi yang eksplisit atau diam-diam yang sangat halus muncul dari interplay antara Aparatus Represif dengan Aparatus Ideologi Negara,⁴⁴ kehidupan sehari-hari memberikan begitu banyak menegani hal itu.

5. Teori Kebijakan Makroekonomi

Makroekonomi berkembang menjadi kata yang populer sekaligus *powerful* di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Sebagaimana yang telah kita saksikan, pemberitaan dan usulan tentang kebijakan makroekonomi setiap hari dilakukan oleh media, cetak dan elektronik. Pidato Presiden dan Pejabat Pemerintah seiring menggunakan istilah itu, begitu pula para pengkritiknya.

Pada hakekatnya makroekonomi adalah istilah yang bersifat teknis dalam lingkup ilmu ekonomi. Ada persoalan ekonomi yang dicakup istilah tersebut, banyak teori yang berkembang tentang makroekonomi. Urgensi persoalan serta pesatnya perkembangan teori yang terkait, bahkan telah melahirkan cabang ilmu ekonomi tersendiri, yaitu ilmu makroekonomi (*macroeconomics*).⁴⁵ Sementara itu, ilmu ekonomi terus dipelajari karena dianggap berguna untuk memberikan petunjuk-petunjuk mengenai kebijakan apa yang bisa diambil untuk menaggulangi berbagai permasalahan ekonomi. Makroekonomi dipercayai bisa menjadi dasar kebijakan makroekonomi.

⁴⁴ Ibid. Hal170

⁴⁵

Satu unit analisa makroekonomi adalah perekonomian nasional suatu Negara. Logika analisisnya kurang lebih sebagai berikut: adanya permasalahan, adanya tujuan, tersedianya teori-teori serta direkomendasikanya beberapa instrumen kebijakan makroekonomi.⁴⁶

Kebanyakan textbook makro ekonomi mengemukakan tiga pokok permasalahan makroekonomi yang penanganannya menjadi tujuan utama dari berbagai instrumen kebijakan yang dipilih. Permasalahan pokok tersebut adalah tentang : output, penggunaan tenaga kerja, dan harga. Disebutkan, tujuan umum dari penanganan masalah output adalah bagaimana mencapai tingkat produksi yang tinggi. Tingkat pencapaiannya yang tinggi itu diinginkan tumbuh dengan cepat dari tahun ke tahun, serta berlangsung secara terus menerus. Tujuan umum penanganan masalah penggunaan tenaga kerja adalah mencapai tingkat pengerjaan yang tinggi, atau penggunaan tenaga kerja sebanyak-banyaknya dalam perekonomian nasional, ini sama artinya dengan pencapaian tingkat pengangguran yang rendah. Selain itu diharapkan pula terbentuk tingkat upah yang layak bagi para pekerja. Sedangkan tujuan penanganan masalah harga adalah tercapainya tingkat harga umum (inflasi) yang stabil.⁴⁷

Sebagian textbook meenyebutkan masalah lain, yaitu perdagangan luar negeri. Penanganan masalah perdagangan luar negeri bertujuan dari memelihara keseimbangan dan kestabilan dalam ekspor dan impor. Kestabilan ekspor dan impor dianggap akan membawa kestabilan pada

nilai tukar uang domestik terhadap mata uang asing. Lebih jauh lagi, hubungan ekonomi dengan luar negeri dikelola agar terjadi keseimbangan pada neraca pembayaran luar negeri secara keseluruhan, termasuk transaksi modal didalamnya.⁴⁸

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, makroekonomi merekomendasikan beberapa instrumen kebijakan pokok. Instrumen kebijakan adalah variabel ekonomi yang digunakan oleh pemerintah dan atau bank sentral, untuk mengendalikan perekonomian. Pengendalian itu bisa secara langsung maupun secara tidak langsung, serta dalam kadar yang berbeda-beda. Kebijakan pokok yang tersedia dikelompokkan menjadi : Kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan ekonomi luar negeri. Pada masing-masing kebijakan pokok tersedia berbagai pilihan instrumen, ataupun campuran instrumen. Satu instrumen dapat diajukan untuk mempengaruhi satu atau lebih tujuan makroekonomi.⁴⁹

Kebijakan fiskal meliputi segala kebijakan pengeluaran pemerintah dan kebijakan perpajakan. Bagaimana pemerintah memutuskan orientasi dan angka-angka pengeluarannya. Bagaimana pemerintah menetapkan tingkat perpajakan, serta detil-detil upaya-upaya penerimaan perpajakannya. Serta bagaimana pemerintah mengelola anggarannya secara umum, termasuk cara-cara membiayainya jika anggaran tersebut bersifat defisit, pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan. Dalam konteks pembiayaan tersebut, pemerintah

Kebijakan moneter adalah kebijakan pengendalian jumlah uang yang beredar. Oleh karena jumlah uang yang beredar dipengaruhi oleh banyak hal, maka cangkupannya juga luas. Yang terutama adalah berkenaan dengan kebijakan perbankan, suku bunga, dan sistem pembayaran. Kebijakan perbankan antara lain mengenai : kecukupan modal bank, rasio minimum antara modal dan kredit yang disalurkan yang disalurkan, serta berbagai aturan teknis lainnya. Perlu diketahui bahwa kebijakan moneter di banyak negara, termasuk di Indonesia, dilaksanakan oleh bank sentral yang relatif independen terhadap pemerintahan. Biasanya ada mekanisme koordinasi dengan pemerintah, yang diatur dalam Undang-undang.⁵¹

Sedangkan kebijakan ekonomi luar negeri mencakup kebijakan perdagangan, kebijakan tentang sistem devisa, dan kebijakan tentang nilai tukar mata uang domestik dengan mata uang (Valuta) asing.

H. Definisi Konseptual

Konsep atau definisi penjelasan sebuah hal yang sangat vital dalam sebuah penelitian. Jika rumusan masalah dan kerangka teoritik sudah jelas, maka fakta atau fenomena mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok penelitian, dan sebuah konsep adalah merupakan definisi secara singkat dari fakta-fakta atau fenomena tersebut.

1. Neoliberalisme, Adalah paham ekonomi politik yang meletakkan bahwa kesejahteraan manusia hanya dapat dicapai dengan cara meliberalisasikan kebebasan, keterampilan kewirausahaan individu dan meletakkan kebebasan

1. Neoliberalisme itu pada dasarnya kerangka yang diiriskan oleh hak milik

pribadi yang kuat, pasar bebas dan perdagangan bebas. Di dalam kerangka itu peran negara adalah untuk menciptakan dan melindungi perantara tersebut.

2. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, Setiap individu atau warga negara memiliki hak yang sama atas warga negara yang lain. Dengan demikian berdasarkan kesepakatan kontrak sosial, maka setiap individu menyerahkan semua haknya kepada kesepakatan komunitas.

3. Demokrasi Politik, dimana sebuah sistem didalamnya terkandung muatan utama kerakyatan. Yaitu demojrasi yang tidak hanya mengutamakan prosudural (fungsi pemilihan umum) tetapi lebih substantif, terutama dengan melibatkan pengertian perwakilan lapisan bawah seperti kaum buruh, petani, nelayan dan kaum miskin kota.

4. Demokrasi Ekonomi atau ekonomi kerakyatan, adalah demokrasi ekonomi yang menitikberatkan pada kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian, oleh sebab itu partisipasi masyarakat dalam perekonomian tidak terbatas hanya pada melakukan produksi tetapi, harus meliputi pula berlangsungnya proses produksi dan distribusi.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah deskriptif eksploratif,

... .. Metode ini adalah disoliditi dengan menggambarkan

atau melukiskan objek atau subjek penelitian, berdasarkan realitas yang tampak atau sebagaimana adanya.

Sedangkan yang dimaksud eksploratif adalah penelitian yang berusaha mencari atau mengungkapkan hal-hal yang belum pernah diungkapkan.

2. Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan yaitu pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu, teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang tersedia menjadi objek diantaranya, dokumen UU No.25/2007 PMA dan dokumen Peraturan Presiden No.76/2007 Tentang Usaha Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan dan Peraturan Presiden No.77/2007 Tentang Bidang Usaha Terbuka dan Batas Kepemilikan Modal Asing. Penelitian dengan menggunakan teknik ini untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

a) Unit Analisa

Unit analisa pada penelitian ini memfokuskan pada UU No. 25 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden No.76 dan 77, tentang Perluasan Dominasi Modal Asing.

b) Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa dengan metode kualitatif yaitu analisa yang diajukan atau disajikan bukan dalam

.....

masing-masing variabel, mula-mula data yang diperoleh dibaca, dipelajari, ditelaah dan selanjutnya akan dilakukan pengelompokan data sesuai dengan bidang isu yang dibahas dalam penelitian atau melakukan kategorisasi data. Tahap akhir analisa ini adalah melakukan reduksi abstraksi. Abstraksi adalah suatu usaha untuk membuat rangkuman yang inti pernyataannya perlu dijaga sehingga tetap terjaga didalamnya.⁵²